

Transformasi Paradigma Kurikulum Nasional di Indonesia (1947-2022) : Perspektif Moderasi Beragama dan SDGs

Fahri Hidayat¹, Maghfira Febriana²

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri^{1,2}

fahrihidayat@uinsaizu.ac.id¹, maghfira.febriana@uinsaizu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia periode 1947-2022 dalam perspektif moderasi beragama dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan analisis-kritis. Sumber data diperoleh dari dokumen kurikulum nasional, regulasi pendidikan, dokumen UNESCO dan SDGs, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan nasional mengalami transformasi dari paradigma administratif menuju paradigma humanistik, partisipatif, dan berbasis kompetensi. Nilai moderasi beragama semakin terintegrasi melalui penguatan pendidikan karakter, toleransi, dan profil pelajar Pancasila, terutama pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Selain itu, kurikulum pendidikan Nasional juga semakin relevan dengan SDG 4 melalui penguatan pendidikan inklusif, literasi global, pembelajaran sepanjang hayat, dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Artikel ini menawarkan pembacaan historis-kritis terhadap transformasi kurikulum nasional Indonesia dengan menunjukkan bagaimana perubahan kurikulum dari 1947 hingga 2022 mengarah kepada transformasi paradigma yang berkelanjutan dari pembentukan identitas nasional menuju pendidikan berkelanjutan berbasis moderasi beragama dan kewargaan global.

Kata kunci : Kurikulum Nasional; Transformasi Kurikulum; Moderasi Beragama; Sustainable Development Goals (SDGs).

Abstract

This study aims to reconstruct the paradigm of elementary and secondary education curricula in Indonesia during the 1947–2022 period from the perspectives of religious moderation and the Sustainable Development Goals (SDGs). The study employed a qualitative approach using library research and a critical approach. Data sources were obtained from national curriculum documents, educational regulations, UNESCO and SDGs reports, as well as relevant scientific literature. Data collection techniques were conducted through documentation studies and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the development of the national curriculum has transformed from an administrative paradigm toward a humanistic, participatory, and competency-based paradigm. The values of religious moderation have become increasingly integrated through the strengthening of character education, tolerance, and the Pancasila student profile, particularly in the 2013 Curriculum and the Merdeka Curriculum. In addition, the elementary and secondary



Tanzhimuna : Jurnal Manajemen Pendidikan

Vol. 6, No. 1, Juni 2026

<https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tanzhimuna/index>

P-ISSN: 2808 - 0793

E-ISSN: 2807 - 968X

education curriculum has become increasingly relevant to SDG 4 through the strengthening of inclusive education, global literacy, lifelong learning, and the development of 21st-century competencies. This article offers a historical-critical reading of the transformation of Indonesia's national curriculum by demonstrating how curriculum changes from 1947 to 2022 have led to a sustained paradigm shift from nation-building and national identity formation toward sustainable education grounded in religious moderation and global citizenship.

Keywords : National Curriculum; Curriculum Transformation; Religious Moderation; Sustainable Development Goals (SDGs).



Pendahuluan

Kurikulum adalah instrumen strategis dalam membentuk arah pendidikan nasional. Di dalamnya tercermin orientasi ideologis, politik, dan kultural suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, perubahan kurikulum pendidikan Nasional sejak 1947 hingga 2022 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan tuntutan globalisasi (R. Hidayah et al., 2022). Sejarah perkembangan kurikulum Indonesia memperlihatkan bahwa setiap perubahan kurikulum selalu membawa paradigma baru. Sejak Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, hingga Kurikulum Merdeka 2022, pendidikan Indonesia terus berkembang dari paradigma administratif menuju paradigma pembelajaran yang lebih transformative.

Secara historis, kurikulum awal pascakemerdekaan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Meskipun demikian, dari awal kurikulum di Indonesia sudah mulai diarahkan untuk membentuk identitas bangsa yang merdeka. Dalam dokumen sejarah kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dijelaskan bahwa pendidikan nasional setelah kemerdekaan diarahkan untuk “*membentuk manusia Indonesia yang susila dan cakap serta bertanggung jawab*”. Perubahan politik nasional kemudian memengaruhi orientasi pendidikan dan kurikulum nasional. Hal ini bisa dilihat dari, misalnya, masuknya ideologi Manifesto Politik (Manipol) Usdek (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) pada Kurikulum 1964 dan perubahan menjadi Pendidikan Moral Pancasila pada Kurikulum 1968. Selanjutnya, Kurikulum 1975 mulai memperkenalkan pendekatan berbasis tujuan (*objective-based curriculum*), efisiensi pembelajaran, dan sistem instruksional yang lebih sistematis (M. T. Hidayat et al., 2025). Pada periode berikutnya, Kurikulum 1984 menekankan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), sedangkan Kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka menekankan kompetensi, karakter, fleksibilitas belajar, dan penguatan profil pelajar Pancasila (Allo, 2020).

Dinamika perubahan kurikulum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan sosial terkait meningkatnya radikalisme berbasis agama dan kebutuhan penguatan pendidikan berkelanjutan (Nursyaidah et al., 2023). Di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendidikan dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki karakter moderat. Dalam konteks ini, konsep moderasi beragama menjadi sangat relevan sebagai paradigma pendidikan nasional. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan nilai keseimbangan, toleransi, anti-kekerasan, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai prinsip utama kehidupan berbangsa.

Di sisi lain, agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat (SDG 4), menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. SDG 4 menargetkan “*inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*”. UNESCO menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan proses untuk mengatasi hambatan partisipasi dan pencapaian peserta didik agar seluruh individu memperoleh kesempatan belajar yang setara (UNESCO, 2005). Selain itu, pendidikan berkualitas harus mampu mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, nilai perdamaian, kewargaan global, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. SDG 4.7 bahkan secara eksplisit menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, budaya damai, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kewargaan global.

Perspektif SDGs memiliki keterkaitan yang kuat dengan moderasi beragama karena keduanya sama-sama menekankan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Oleh sebab itu, rekonstruksi paradigma kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan karakter moderat dan kesadaran global peserta didik. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun budaya damai dan mencegah berkembangnya ekstremisme di masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji hal ini. Di antaranya oleh Vina Nur Hidayah dan Fitri Yuliawati (2021) yang meneliti hubungan Kurikulum Tematik 2013 dengan framework SDGs di Sekolah Dasar dan menyimpulkan bahwa Kurikulum 2013 memiliki kesesuaian yang kuat dengan dimensi SDGs pada aspek pengetahuan dan pemahaman (*knowledge and understanding*), keterampilan dan aplikasi (*skills and application*), serta nilai dan sikap (*values and attitudes*) yang mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21 (V. N. Hidayah & Yuliawati, 2021). Selanjutnya, Siti Zulaiha B. Abas, Muh. Arif, Mujahid Damopili, dan Burhanuddin AK Mantau (2025) mengkaji internalisasi moderasi beragama dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Merdeka Belajar dan menemukan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dapat diintegrasikan secara efektif melalui pembelajaran kontekstual, reflektif, dan berbasis karakter yang menekankan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik, sehingga Kurikulum Merdeka menjadi instrumen penting dalam membangun pendidikan Islam yang humanistik dan transformatif (Abas et al., 2025).

Pada tahun yang sama, Salwa Azahra Putri Salsabila, Fina Nabilah, dan Ichsan Fauzi Rachman (2025) mengevaluasi implementasi SDGs dalam Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan menyimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mengakomodasi nilai-nilai SDGs melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman guru, sumber daya pendukung, dan kebijakan yang lebih operasional (Salsabila et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, kajian yang secara khusus membaca transformasi paradigma kurikulum kurikulum pendidikan Nasional dari perspektif moderasi beragama dan SDGs masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis kurikulum tertentu dan aspek implementatif, sehingga belum menjelaskan bagaimana transformasi paradigma kurikulum nasional Indonesia berlangsung dalam rentang sejarah. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis transformasi kurikulum nasional Indonesia periode 1947–2022 melalui perspektif moderasi beragama dan Sustainable Development Goals (SDGs) (Azalia et al., 2023, 2023).

Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana dinamika transformasi paradigma kurikulum nasional Indonesia periode 1947-2022; (2) bagaimana nilai-nilai moderasi beragama terepresentasi dalam perkembangan kurikulum nasional pada setiap periode; dan (3) bagaimana relevansi transformasi kurikulum nasional Indonesia terhadap prinsip-prinsip SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan berkelanjutan? Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi paradigma kurikulum kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia periode 1947-2022 melalui perspektif moderasi beragama dan Sustainable Development Goals (Advocates for International Development (A4ID), 2022).

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan historis-kritis untuk merekonstruksi paradigma kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia periode 1947–2022 dalam perspektif moderasi beragama dan Sustainable Development Goals (Creswell, John W, 2013). Pendekatan historis digunakan untuk menelaah dinamika perubahan kurikulum berdasarkan konteks sosial, politik, dan pendidikan pada setiap periode perkembangan kurikulum nasional. Sedangkan pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis relevansi paradigma kurikulum terhadap nilai moderasi beragama dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sumber primer penelitian mencakup seluruh dokumen kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia sejak Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka 2022. Dokumen penelitian ditentukan secara purposive dengan memilih dokumen-dokumen yang memiliki relevansi langsung terhadap tujuan penelitian, meliputi naskah kurikulum nasional, regulasi pendidikan, dokumen Kemendikbud, laporan UNESCO, dokumen SDGs, artikel jurnal bereputasi, dan literatur ilmiah yang membahas moderasi beragama serta pendidikan berkelanjutan. Subjek penelitian berupa dokumen kebijakan dan literatur akademik yang memuat paradigma, orientasi, serta implementasi kurikulum pendidikan nasional.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan lembar analisis dokumen dan matriks kategorisasi data. Lembar analisis digunakan untuk mengidentifikasi dimensi perubahan kurikulum, orientasi pendidikan, nilai moderasi beragama, dan indikator SDGs pada setiap periode kurikulum. Penelitian ini menggunakan indikator moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal sebagai kerangka untuk menganalisis orientasi nilai dalam setiap periode kurikulum nasional. Analisis SDGs difokuskan pada SDG 4 (*Quality Education*) yang mencakup pendidikan inklusif dan berkeadilan, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, literasi global, kewargaan global, dan kompetensi abad ke-21. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menelaah transformasi tujuan pendidikan, orientasi kurikulum, pendekatan pembelajaran, kompetensi lulusan, serta nilai karakter yang dikembangkan dalam kurikulum nasional Indonesia periode 1947-2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah sumber primer dan sekunder secara sistematis. Sumber primer meliputi dokumen resmi kurikulum nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta dokumen kebijakan pendidikan pemerintah. Sumber sekunder berupa artikel jurnal terindeks, buku akademik, prosiding, dan laporan lembaga internasional seperti UNESCO dan United Nations yang relevan dengan pendidikan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan berbagai dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta perspektif konseptual moderasi beragama dan SDGs untuk memperoleh interpretasi data yang objektif dan mendalam.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, kategorisasi, dan klasifikasi data berdasarkan tema perubahan kurikulum, orientasi pendidikan, moderasi beragama, dan indikator SDG 4. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel periodisasi, narasi historis, dan interpretasi konseptual untuk menggambarkan perkembangan paradigma kurikulum nasional. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui

interpretasi kritis terhadap keterkaitan antara perubahan kurikulum kurikulum pendidikan Nasional dengan nilai moderasi beragama serta prinsip pendidikan inklusif dan berkelanjutan dalam SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 1947-2022

Perkembangan kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia selalu berjalan dinamis. Kurikulum pada awal kemerdekaan berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas nasional setelah Indonesia lepas dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang (Rajurkar et al., 2018, 2018). Sistem pendidikan kolonial sebelumnya bersifat diskriminatif karena membedakan sekolah berdasarkan kelas sosial dan etnis masyarakat. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah mulai menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih egaliter. Kurikulum 1947 menjadi momentum awal lahirnya pendidikan nasional yang berupaya membentuk manusia Indonesia yang Merdeka (M. Fuadi et al., 2023). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa kurikulum sejak awal merupakan alat ideologis untuk membangun bangsa.

Kurikulum 1947 atau *Rentjana Pelajaran* lahir dalam suasana transisi pascakolonial yang masih dipengaruhi sistem pendidikan Belanda. Struktur pembelajarannya masih sederhana. Orientasinya lebih pada pembentukan watak dan moral kewarganegaraan (Pujiono et al., 2025). Pada fase ini, pendidikan diarahkan pada pembangunan identitas nasional dan patriotisme. Hal tersebut dapat dipahami karena negara baru merdeka membutuhkan legitimasi ideologis melalui pendidikan. Secara pedagogis, metode pembelajaran masih bersifat tradisional dengan dominasi guru sebagai pusat pembelajaran. Namun demikian, kurikulum ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya sistem pendidikan nasional Indonesia yang berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri.

Perubahan menuju Kurikulum 1952 menunjukkan adanya upaya penyempurnaan struktur pendidikan nasional secara lebih sistematis. Kurikulum ini mulai menekankan hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Negara berusaha menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun pascakemerdekaan. Dalam perspektif historis, orientasi pendidikan mulai mengarah menuju pembangunan sumber daya manusia. Kurikulum ini juga menunjukkan awal perhatian terhadap relevansi pendidikan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Secara reflektif, perubahan tersebut memperlihatkan kesadaran pemerintah bahwa pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada Kurikulum 1964, orientasi pendidikan berubah secara signifikan akibat pengaruh politik Demokrasi Terpimpin. Pemerintah memasukkan ideologi Manipol Usdek ke dalam struktur pendidikan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Di sini, pendidikan diarahkan untuk membentuk "manusia sosialis Indonesia" sesuai arah politik negara saat itu (Pujiono et al., 2025). Dalam konteks ini, kurikulum menjadi alat reproduksi ideologi negara. Perubahan materi kewarganegaraan dan sejarah menunjukkan bahwa politik memiliki pengaruh langsung terhadap isi kurikulum nasional. Secara interpretatif, Kurikulum 1964 memperlihatkan bagaimana pendidikan sering kali digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan politik.

Pergantian rezim menuju Orde Baru melahirkan Kurikulum 1968 yang menandai perubahan paradigma ideologis pendidikan nasional. Pemerintah mengganti orientasi pendidikan dari sosialisme menuju pembangunan nasional berbasis Pancasila dan UUD

1945. Pendidikan Moral Pancasila menjadi instrumen utama pembentukan karakter warga negara. Kurikulum 1968 juga mempertegas pendidikan sebagai sarana stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional (Pujiono et al., 2025). Pada tahap ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia pembangunan yang patuh terhadap negara dan mendukung modernisasi nasional. Kurikulum era Orde Baru memperlihatkan kuatnya sentralisasi negara dalam menentukan arah pendidikan nasional.

Kelahiran Kurikulum 1975 menjadi titik penting dalam modernisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah mulai menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) dalam penyusunan kurikulum. Pendekatan ini dipengaruhi paradigma administrasi modern dan teori pendidikan Barat. Kurikulum 1975 memperkenalkan pendekatan berbasis tujuan (*objective-based curriculum*) yang disusun secara sistematis melalui tujuan institusional dan tujuan instruksional (Wibowo et al., 2023). Pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai transmisi pengetahuan. Pendidikan mulai dipandang sebagai proses yang harus dirancang secara terukur. Perubahan ini menunjukkan masuknya paradigma manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pendekatan Program Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dalam Kurikulum 1975 memperlihatkan dominasi paradigma teknokratis dalam pendidikan. Guru diwajibkan merumuskan tujuan pembelajaran secara rinci sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Setiap proses pembelajaran harus memiliki indikator yang terukur. Paradigma ini mencerminkan pengaruh teori behavioristik yang berkembang kuat dalam pendidikan dunia pada masa itu. Dalam praktiknya, guru menjadi sangat administratif karena harus menyusun satuan pelajaran secara detail. Pendekatan ini memberi kontribusi penting terhadap profesionalisasi sistem pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia.

Selain itu, kurikulum 1975 juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap efisiensi penggunaan waktu belajar. Struktur pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pemerintah mulai memandang sekolah sebagai institusi yang harus menghasilkan output pendidikan sesuai kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, kurikulum ini memperkenalkan pengelompokan bidang studi menjadi pendidikan umum, akademik, dan keterampilan. Konsep tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan vokasional. Di sini, orientasi pembangunan ekonomi nasional terlihat memengaruhi desain kurikulum pendidikan.

Kurikulum 1984 lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap Kurikulum 1975 yang dianggap terlalu administratif dan berorientasi hafalan. Pemerintah mulai menekankan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang berpusat pada peserta didik (Pujiono et al., 2025). Perubahan ini dipengaruhi perkembangan teori konstruktivisme dan psikologi pendidikan modern yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif pembelajaran. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi. Guru lebih diarahkan sebagai fasilitator pembelajaran.

Pendekatan CBSA dalam Kurikulum 1984 menekankan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan mengomunikasikan hasil belajar. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains modern dan kebutuhan keterampilan abad industri. Pendidikan mulai dipahami sebagai proses pengembangan kemampuan belajar sepanjang hayat. CBSA menjadi awal masuknya paradigma pendidikan humanistik dan konstruktivistik dalam pendidikan nasional Indonesia.

Selain CBSA, Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan keterampilan proses sebagai strategi pembelajaran ilmiah. Peserta didik dilatih untuk menemukan konsep sendiri melalui pengalaman belajar langsung. Pendekatan ini menunjukkan perubahan besar dari budaya hafalan menuju budaya berpikir ilmiah. Pemerintah mulai menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak memungkinkan seluruh fakta diajarkan secara langsung kepada siswa. Oleh karena itu, kemampuan belajar menjadi lebih penting dibanding penguasaan informasi semata. Paradigma ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan berbasis kompetensi pada periode berikutnya (Azalia et al., 2023).

Kurikulum 1984 juga memperkenalkan konsep muatan lokal sebagai bentuk desentralisasi terbatas dalam pendidikan nasional. Pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan lingkungan sosial yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh kurikulum nasional yang sentralistik. Muatan lokal memungkinkan sekolah mengembangkan materi pembelajaran sesuai karakteristik daerah masing-masing. Kebijakan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pluralitas budaya Indonesia dalam pendidikan. Secara interpretatif, muatan lokal menjadi bentuk awal integrasi pendidikan nasional dengan kearifan lokal dan identitas budaya daerah.

Kurikulum 1994 lahir dalam konteks tuntutan perluasan akses pendidikan dan implementasi wajib belajar sembilan tahun. Pemerintah berupaya menyempurnakan Kurikulum 1984 dengan menyesuaikan perkembangan sosial dan kebutuhan pembangunan nasional. Namun demikian, kurikulum ini dikenal sangat padat materi karena menggabungkan orientasi akademik dengan tuntutan keterampilan secara bersamaan. Beban belajar peserta didik meningkat akibat banyaknya mata pelajaran dan materi yang harus dipelajari. Dalam praktiknya, guru kembali cenderung menggunakan metode ceramah untuk mengejar target materi.

Memasuki era reformasi, paradigma pendidikan nasional mengalami perubahan besar melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Pendidikan mulai diarahkan pada pengembangan kompetensi peserta didik. Perubahan ini dipengaruhi oleh globalisasi dan kebutuhan daya saing sumber daya manusia abad ke-21. Kurikulum menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Dalam konteks global, Indonesia mulai menyesuaikan sistem pendidikannya dengan tren pendidikan internasional berbasis kompetensi. Secara reflektif, KBK menunjukkan transformasi pendidikan dari paradigma isi menuju paradigma capaian pembelajaran.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 memperkuat desentralisasi pendidikan melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada sekolah. Sekolah diberikan hak untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta lingkungan sosialnya. Kebijakan ini merupakan dampak reformasi politik dan otonomi daerah yang berkembang pasca-1998. Guru didorong menjadi pengembang kurikulum (Pujiono et al., 2025). Akan tetapi, ketimpangan kualitas sumber daya pendidikan antar daerah menyebabkan implementasi KTSP tidak berjalan merata. Situasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan membutuhkan kesiapan institusional yang kuat.

Kurikulum 2013 hadir sebagai respons terhadap tantangan globalisasi, revolusi teknologi, dan degradasi karakter generasi muda. Pemerintah menekankan penguatan pendidikan karakter melalui integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diperkenalkan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selain itu, kurikulum ini memperkuat

pendidikan karakter berbasis nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dalam perspektif historis, Kurikulum 2013 memperlihatkan upaya negara menyeimbangkan tuntutan global dengan identitas nasional Indonesia. Pendidikan tidak lagi hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter bangsa.

Kurikulum Merdeka 2022 menjadi bentuk reformasi pendidikan terbaru yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini lahir sebagai respons terhadap krisis pembelajaran akibat pandemi Covid-19 dan perubahan kebutuhan kompetensi global. Pembelajaran diarahkan pada pengembangan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan adaptif peserta didik. Guru diberikan ruang lebih luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Paradigma ini menunjukkan pergeseran dari pendidikan yang sangat administratif menuju pendidikan yang lebih humanis dan fleksibel. Secara reflektif, Kurikulum Merdeka memperlihatkan upaya rekonstruksi pendidikan Indonesia menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Perjalanan kurikulum Indonesia dari 1947 hingga 2022 menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan politik dan arah pendidikan nasional. Setiap pergantian rezim politik hampir selalu diikuti perubahan kurikulum yang membawa orientasi ideologis baru. Pada era Demokrasi Terpimpin, pendidikan diarahkan pada sosialisme dan revolusi nasional, sedangkan era Orde Baru menekankan pembangunan dan stabilitas nasional. Reformasi membawa paradigma demokratisasi, desentralisasi, dan kompetensi global. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurikulum merupakan refleksi dari ideologi negara dan orientasi pembangunan nasional pada setiap periode sejarah. Perubahan kurikulum tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan teknis pendidikan.

Selain faktor politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi determinan utama perubahan kurikulum nasional. Masuknya pendekatan sistem instruksional, CBSA, keterampilan proses, pembelajaran berbasis kompetensi, hingga Kurikulum Merdeka menunjukkan adaptasi pendidikan Indonesia terhadap perkembangan pedagogi global. Kurikulum nasional terus bergerak dari paradigma hafalan menuju paradigma pembelajaran aktif. Pendidikan di Indonesia berusaha mengikuti tuntutan masyarakat global yang membutuhkan sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Akan tetapi, perubahan kurikulum yang terlalu cepat sering menimbulkan kesenjangan implementasi di lapangan. Guru dan sekolah sering kali belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan paradigma pembelajaran tersebut.

Dinamika kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia memperlihatkan proses panjang pencarian identitas pendidikan nasional. Kurikulum menjadi instrumen ideologis, sosial, budaya, dan pembangunan bangsa. Dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka 2022 terlihat adanya pergeseran paradigma dari pendidikan administratif menuju pendidikan yang lebih humanistik, partisipatif, dan berbasis kompetensi. Perubahan tersebut mencerminkan upaya negara menjawab tantangan zaman sekaligus mempertahankan identitas kebangsaan Indonesia.

Paradigma Kurikulum dalam Perspektif Moderasi Beragama

Perkembangan kurikulum pendidikan nasional Indonesia berkaitan dengan rekonstruksi nilai-nilai sosial-keagamaan dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun harmoni sosial melalui internalisasi nilai moderasi beragama (Idris, 2021). Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang beragama yang menempatkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai prinsip

utama kehidupan sosial. Kurikulum pendidikan Nasional menjadi ruang penting dalam proses penanaman nilai tersebut karena pada fase ini karakter peserta didik mulai terbentuk secara fundamental (Ichwan et al., 2024). Oleh sebab itu, rekonstruksi paradigma kurikulum berbasis moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional. Paradigma ini memiliki urgensi untuk membangun kesadaran sosial dan sikap keberagamaan dalam konteks negara-bangsa yang inklusif (Fahri Hidayat, 2026).

Secara historis, pendidikan nasional Indonesia sejak awal telah memiliki semangat persatuan kebangsaan. Kurikulum 1947 hingga Kurikulum 1968 memperlihatkan upaya negara membangun identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan dan moral bangsa. Namun, pada tahap awal tersebut, konsep moderasi beragama belum dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka kurikulum nasional. Nilai-nilai toleransi dan persatuan lebih banyak dimasukkan melalui pendidikan moral dan semangat kebangsaan (Galuh Mahardika & Nur Ramadhan, 2021). Dalam konteks ini, agama ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang mendukung integrasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sejak awal telah tendensi ke arah pengembangan moderasi beragama walaupun belum menggunakan istilah tersebut secara formal.

Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan menekankan pentingnya keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan agama dan penghormatan terhadap keberagaman sosial. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya polarisasi, intoleransi, dan radikalisme yang berpotensi mengancam persatuan bangsa (F. Hidayat & Febriana, 2025). Dalam kerangka pendidikan, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya, melainkan mengarahkan praktik keberagamaan agar tidak ekstrem dan eksklusif. Pendidikan menjadi sarana strategis untuk menanamkan cara pandang keagamaan yang ramah, dialogis, dan terbuka terhadap perbedaan.

Paradigma moderasi beragama dalam kurikulum nasional berakar pada prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, dan *tasamuh* yang berkembang dalam tradisi keislaman moderat di Indonesia. Prinsip *tawassuth* mengajarkan sikap tengah dan menghindari ekstremisme dalam berpikir maupun bertindak. *Tawazun* menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual serta hubungan antara hak individu dan kepentingan sosial. *I'tidal* mengandung makna keadilan dan proporsionalitas dalam memandang perbedaan. Sementara itu, *tasamuh* mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama maupun budaya. Dalam konteks kurikulum pendidikan Nasional, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif.

Kurikulum pendidikan nasional pada era Orde Baru sebenarnya telah memasukkan unsur toleransi melalui Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Pujiono et al., 2025). Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang menjunjung persatuan dan stabilitas nasional. Akan tetapi, pendekatan tersebut masih cenderung bersifat indoktrinatif, belum memberi ruang dialogis bagi pengembangan kesadaran keberagaman secara kritis. Peserta didik lebih diarahkan untuk menghafal nilai-nilai moral dibanding memahami makna keberagaman dalam kehidupan nyata. Akibatnya, pendidikan toleransi pada masa tersebut sering kali bersifat normatif dan kurang menyentuh dimensi praksis sosial pada masyarakat yang heterogen.

Masuknya paradigma CBSA dalam Kurikulum 1984 menjadi titik penting bagi pengembangan pendidikan moderasi beragama. Pendekatan pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik lebih terlibat dalam proses dialog. Dalam perspektif

moderasi beragama, model pembelajaran partisipatif membantu siswa memahami perbedaan melalui interaksi sosial yang lebih terbuka. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Guru diposisikan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam memahami realitas sosial secara kritis (Melisa et al., 2025). Kondisi tersebut menciptakan ruang pedagogis yang lebih kondusif untuk pengembangan sikap toleran dan inklusif.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi pada era reformasi membawa tantangan baru terhadap kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia. Arus informasi digital memungkinkan penyebaran ideologi radikal dan intoleran secara lebih cepat melalui media sosial dan platform digital. Dalam situasi ini, kurikulum pendidikan Nasional menghadapi tantangan serius untuk membangun ketahanan ideologis peserta didik. Kurikulum dituntut untuk mengembangkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik perlu dibekali kemampuan memilah informasi keagamaan secara rasional dan kontekstual.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 mulai memperlihatkan perhatian terhadap pengembangan kompetensi sosial peserta didik. Pendidikan diarahkan tidak hanya pada penguasaan materi. Melalui kurikulum ini, pemerintah mulai mengarahkan pendidikan pada kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Dalam konteks moderasi beragama, kompetensi sosial tersebut sangat penting untuk membangun kehidupan multikultural yang harmonis. Peserta didik didorong untuk memahami keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dihormati. Pada titik ini dapat dilihat bahwa perubahan pendidikan nasional mulai bergeser dari orientasi akademik menuju pembentukan karakter sosial yang lebih inklusif.

KTSP 2006 memberikan ruang lebih luas bagi sekolah untuk mengembangkan nilai moderasi beragama sesuai konteks lokal masing-masing. Sekolah dapat memasukkan nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan melalui muatan lokal maupun budaya sekolah. Kebijakan desentralisasi kurikulum memungkinkan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, pendekatan lokal sangat penting karena setiap daerah memiliki dinamika sosial-keagamaan yang berbeda. Pendidikan moderasi beragama menjadi lebih kontekstual dengan pengalaman hidup peserta didik (Alsubaie, 2016). Dalam hal ini, desentralisasi pendidikan membuka peluang penguatan budaya damai dalam sistem pendidikan nasional.

Kurikulum 2013 mempertegas penguatan pendidikan karakter sebagai inti pembangunan pendidikan nasional. Nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dijadikan fondasi pembentukan karakter peserta didik (Nursyaidah et al., 2023). Dalam perspektif moderasi beragama, penguatan karakter religius dimaknai sebagai pembentukan sikap keberagamaan yang humanis dan toleran. Pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 juga mendorong peserta didik berpikir rasional dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Pendidikan agama diarahkan pada penghayatan nilai moral universal agama. Secara interpretatif, Kurikulum 2013 menjadi momentum penting integrasi moderasi beragama dalam pendidikan karakter nasional.

Penguatan moderasi beragama semakin relevan ketika Indonesia menghadapi berbagai kasus intoleransi dan konflik sosial berbasis identitas (Purwanta et al., 2025). Fenomena diskriminasi agama, ujaran kebencian, dan radikalisme menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membangun budaya toleransi yang kuat. Dalam konteks ini, sekolah memiliki tanggung jawab strategis sebagai ruang sosial pembentukan budaya damai. Kurikulum harus dirancang untuk membangun

kemampuan dialog lintas perbedaan. Pendidikan moderasi beragama perlu diintegrasikan dalam seluruh aktivitas pendidikan (Azalia et al., 2023).

Selanjutnya, Kurikulum Merdeka 2022 memberikan peluang yang lebih besar bagi implementasi moderasi beragama melalui pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nilai gotong royong, kebhinekaan global, serta beriman dan berakhlak mulia diinternalisasikan melalui aktivitas yang mendorong peserta didik menghubungkan berbagai pengalaman belajar. Pendekatan ini pada perkembangan berikutnya dikembangkan lagi melalui prinsip *deep learning* yang menekankan pembelajaran bermakna (*meaningful learning*), kesadaran belajar (*mindful learning*), dan keterlibatan aktif peserta didik. Melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tidak hanya memahami pentingnya toleransi dan kerja sama lintas perbedaan budaya maupun agama, tetapi juga mengalami dan merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam praktik sosial yang nyata (F. Hidayat, 2026). Kurikulum Merdeka merepresentasikan transformasi pendidikan Indonesia menuju paradigma yang lebih humanistik, reflektif, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran mendalam.

Konsep kebhinekaan global dalam Kurikulum Merdeka memiliki relevansi kuat dengan moderasi beragama. Peserta didik didorong untuk memahami identitas lokal dan nasional sekaligus memiliki keterbukaan terhadap budaya global. Sikap ini penting dalam menghadapi tantangan dunia modern yang semakin terhubung secara digital. Pendidikan moderasi beragama membantu peserta didik membangun identitas keagamaan yang kuat tanpa harus menolak keberadaan kelompok lain (M. T. Hidayat et al., 2025). Dalam hal ini, kurikulum diharapkan dapat membentuk warga dunia yang toleran dan beradab.

Selain penguatan kurikulum, implementasi moderasi beragama dalam pendidikan juga membutuhkan transformasi peran guru. Guru harus mampu menjadi teladan dalam praktik toleransi. Dalam banyak kasus, keberhasilan pendidikan moderasi beragama sangat dipengaruhi oleh sikap dan wawasan keberagamaan guru. Oleh karena itu, penguatan kompetensi moderasi beragama bagi tenaga pendidik menjadi kebutuhan dalam reformasi pendidikan nasional.

Tabel 1. Nilai-Nilai Moderasi Beragama pada Perkembangan Kurikulum Nasional

Periode Kurikulum	Karakteristik	Keterangan
Kurikulum 1947-1968	Penanaman identitas nasional, pendidikan moral dan kewarganegaraan	Perspektif tawassuth dan tasamuh tercermin dalam kurikulum yang menekankan persatuan dalam keberagaman sebagai sarana pembentukan peserta didik yang moderat, toleran, dan mampu menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial.
Kurikulum 1975-PMP (Orde Baru)	Penekanan pada stabilitas nasional dan Pendidikan Moral Pancasila	Perspektif tawazun dan i'tidal tercermin dalam upaya kurikulum menyeimbangkan kepentingan individu dan

		kolektif melalui penanaman nilai persatuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa.
Kurikulum 1984 (CBSA)	Pembelajaran aktif dan partisipatif	Perspektif syura dan tasamuh tercermin dalam pendekatan pembelajaran partisipatif yang mendorong dialog, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan dalam proses pembelajaran.
KBK 2004	Berbasis kompetensi, termasuk kompetensi sosial	Perspektif musawah dan tasamuh tercermin dalam pengembangan kompetensi sosial yang menempatkan setiap peserta didik sebagai subjek yang setara serta mampu menghargai perbedaan dalam interaksi sosial.
KTSP 2006	Desentralisasi kurikulum sesuai konteks daerah	Perspektif tawazun dan tasamuh tercermin dalam fleksibilitas kurikulum yang mengakomodasi keragaman konteks lokal tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum 2013	Penguatan pendidikan karakter dan pendekatan saintifik	Perspektif i'tidal, tawassuth, dan tasamuh tercermin dalam penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan religiusitas, rasionalitas, dan penghormatan terhadap keberagaman secara proporsional.
Kurikulum Merdeka (2022)	Profil Pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek, kebhinekaan global	Perspektif moderasi beragama tercermin secara komprehensif melalui pembelajaran kolaboratif dan penguatan kebhinekaan global yang membentuk peserta didik inklusif, adil, toleran, dan terbuka terhadap dialog.

Sumber: Diolah dari dokumen Kurikulum 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka (2022)

Selain guru, lingkungan sekolah juga memiliki peran penting dalam membangun budaya moderasi beragama. Sekolah harus menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Budaya sekolah yang demokratis dapat membentuk pengalaman sosial positif bagi siswa dalam memahami keberagaman (Taufik et al., 2024). Kegiatan ekstrakurikuler, diskusi lintas agama, dan proyek kolaboratif dapat menjadi sarana internalisasi nilai toleransi secara konkret. Pendidikan moderasi beragama akan lebih efektif apabila dipraktikkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Transformasi paradigma kurikulum berbasis moderasi beragama juga relevan dengan agenda pembangunan karakter bangsa di era digital. Generasi muda saat ini hidup dalam lingkungan media sosial yang sering kali memperkuat polarisasi. Dalam situasi tersebut, pendidikan harus menjadi benteng etika dan rasionalitas sosial. Kurikulum perlu mengintegrasikan literasi digital dan literasi keagamaan secara simultan. Peserta didik harus dibekali kemampuan memahami informasi secara kritis agar tidak mudah terpengaruh propaganda ekstremisme.

Meskipun moderasi beragama telah menjadi agenda penting pendidikan nasional, akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian materi pembelajaran agama masih bersifat eksklusif. Selain itu, ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah menyebabkan penguatan moderasi beragama belum berjalan merata. Faktor lingkungan sosial dan pengaruh media digital juga sering kali melemahkan nilai toleransi yang diajarkan di sekolah.

Dalam perspektif filosofis, moderasi beragama memiliki kesesuaian mendalam dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung semangat penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial juga menjadi landasan etis pendidikan moderasi beragama. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum berbasis moderasi beragama sejatinya merupakan penguatan kembali jati diri pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang religius sekaligus menghargai kemanusiaan universal. Paradigma ini penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan kebangsaan Indonesia yang plural.

Transformasi paradigma kurikulum dalam perspektif moderasi beragama mengarah kepada paradigma yang lebih inklusif, humanis, dan demokratis. Perjalanan kurikulum dari era awal kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka memperlihatkan transformasi pendidikan dari orientasi ideologis sempit menuju pembangunan karakter kebangsaan yang pluralis. Moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kurikulum pendidikan Nasional memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama telah hadir sejak awal perkembangan kurikulum nasional dalam bentuk komitmen kebangsaan dan persatuan nasional, namun mengalami pelembagaan yang lebih sistematis pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka melalui penguatan pendidikan karakter, Profil Pelajar Pancasila, serta pembelajaran berbasis keberagaman.

Relevansi Kurikulum Pendidikan Nasional terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Kurikulum pendidikan nasional Indonesia pada abad ke-21 mengalami transformasi paradigma yang semakin selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. SDG 4 menekankan pentingnya *“inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.”* Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan Nasional dipahami sebagai instrumen strategis pembangunan manusia berkelanjutan (UNESCO, 2005). Pendidikan diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, damai, inklusif, dan berdaya saing global.

Secara konseptual, SDGs memandang pendidikan sebagai instrumen multidimensional yang berfungsi mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan konflik kemanusiaan. Dalam dokumen *A Legal Guide SDG 4: Quality Education* ditegaskan bahwa *“Quality education is fundamental to sustainable development.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global (UNESCO, 2005). Dalam konteks Indonesia, kurikulum pendidikan Nasional menjadi medium penting untuk menerjemahkan tujuan global tersebut ke dalam kebijakan pendidikan yang kontekstual.

Relevansi SDG 4 terhadap kurikulum Indonesia terlihat dari perubahan orientasi pendidikan nasional yang semakin menekankan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Kurikulum pendidikan Nasional berorientasi pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan definisi pendidikan inklusif UNESCO yang menekankan proses menghilangkan hambatan partisipasi belajar bagi seluruh peserta didik. Dalam implementasinya, kebijakan wajib belajar, pendidikan inklusi, afirmasi daerah tertinggal, dan digitalisasi pendidikan menunjukkan upaya Indonesia mengintegrasikan prinsip *“leave no one behind”* dalam sistem kurikulum nasional (Advocates for International Development (A4ID), 2022).

Dalam perspektif historis, perkembangan kurikulum Indonesia menunjukkan kecenderungan gradual menuju paradigma pembangunan berkelanjutan. Kurikulum awal pascakemerdekaan lebih berorientasi pada nation and character building sebagai fondasi pembentukan identitas nasional. Namun, memasuki era globalisasi dan reformasi pendidikan, orientasi kurikulum berkembang menuju penguatan kompetensi abad ke-21, literasi global, dan pendidikan karakter berkelanjutan (UNESCO, 2005). Perubahan ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap tuntutan global SDGs yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan KTSP 2006 menjadi awal penting integrasi paradigma SDGs dalam pendidikan Indonesia. Kedua kurikulum tersebut menekankan pengembangan kompetensi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan hidup. Pendekatan ini selaras dengan konsep *life skills education* UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan berkualitas harus membekali peserta didik dengan kemampuan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi global (Pujiono et al., 2025). Di sini, pendidikan dipahami sebagai pengembangan kemampuan sosial dan partisipasi masyarakat berkelanjutan.

Kurikulum 2013 memperkuat integrasi SDGs melalui pendekatan pendidikan karakter dan pembelajaran saintifik. Pendidikan diarahkan untuk membentuk peserta didik yang religius, nasionalis, produktif, kreatif, dan kolaboratif. Dalam konteks SDGs, pendekatan ini relevan dengan target pembangunan manusia yang berorientasi pada

pembentukan warga global yang kritis dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 berkaitan dengan kesadaran sosial, penghormatan terhadap keberagaman, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Kurikulum Merdeka memperlihatkan relevansi yang lebih kuat terhadap SDG 4, terutama dalam aspek pembelajaran inklusif dan penguatan kompetensi global (Advocates for International Development (A4ID), 2022). Profil Pelajar Pancasila yang menjadi inti Kurikulum Merdeka mencakup dimensi beriman dan bertakwa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dimensi tersebut memiliki hubungan langsung dengan target SDG 4.7 tentang pendidikan kewargaan global dan budaya damai (Fadila, 2024). Pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi yang mampu hidup dalam masyarakat multikultural dan menghadapi tantangan global secara kolaboratif. Paradigma ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia semakin bergerak menuju model pendidikan transformatif berbasis keberlanjutan.

SDG 4 juga menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*). UNESCO menjelaskan bahwa ESD merupakan pendidikan yang menanamkan nilai keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi (Hastutie, 2024). Dalam konteks Indonesia, kurikulum pendidikan Nasional mulai mengintegrasikan isu perubahan iklim, konservasi lingkungan, energi terbarukan, dan tanggung jawab sosial melalui berbagai mata pelajaran maupun proyek pembelajaran lintas disiplin. Pendidikan lingkungan hidup yang sebelumnya bersifat tambahan kini semakin menjadi bagian penting dalam pembelajaran kontekstual abad ke-21.

Penguatan literasi global dalam kurikulum Indonesia juga menunjukkan relevansi dengan SDGs. Era globalisasi menuntut peserta didik memiliki kemampuan memahami dinamika internasional, keberagaman budaya, serta tantangan kemanusiaan global. SDG 4.7 menekankan pentingnya *global citizenship education* untuk membangun kesadaran perdamaian dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dalam konteks ini, kurikulum nasional mulai mengembangkan pembelajaran berbasis proyek sosial, kolaborasi lintas budaya, dan pendidikan multikultural sebagai bagian dari penguatan kompetensi global peserta didik.

Pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus menghapus hambatan berbasis gender, ekonomi, etnis, maupun disabilitas. Kurikulum nasional Indonesia berusaha menjawab tantangan tersebut melalui kebijakan pendidikan inklusif (UNESCO, 2005). Sekolah inklusi, bantuan operasional sekolah, serta pengembangan kurikulum adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan bentuk implementasi prinsip *equity* dalam pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum Indonesia sudah mengupayakan jalan menuju pemerataan akses pendidikan (M. H. Fuadi, 2025).

Selain itu, relevansi SDGs dalam kurikulum Indonesia tampak pada penguatan budaya damai dan anti-kekerasan dalam pendidikan. Target SDG 4.7 menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun budaya damai, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendidikan damai menjadi sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dan integrasi nasional. Kurikulum pendidikan Nasional mulai mengintegrasikan nilai toleransi, moderasi beragama, anti-bullying, dan resolusi konflik melalui pendidikan karakter dan budaya sekolah. Di sini, pendidikan diarahkan untuk menghasilkan warga negara yang demokratis dan humanis.

Transformasi digital dalam pendidikan nasional juga memiliki relevansi kuat terhadap agenda SDGs. SDG 4 menekankan pentingnya keterampilan teknologi dan akses pendidikan digital yang merata. Kurikulum Indonesia saat ini semakin menekankan literasi digital, *coding*, *computational thinking*, dan pembelajaran berbasis teknologi (UNESCO, 2005). Langkah ini penting dalam membangun daya saing generasi muda di tengah revolusi industri 4.0. Akan tetapi, tantangan kesenjangan digital antar wilayah masih menjadi hambatan besar dalam implementasi pendidikan berkualitas yang merata di Indonesia.

Dalam sudut pandang pedagogis, SDGs mendorong pendidikan yang partisipatif dan berpusat pada peserta didik. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan individual siswa. Kurikulum Merdeka mengadopsi prinsip tersebut melalui pembelajaran diferensiatif dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar sesuai minat, bakat, dan konteks sosialnya.

Kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia juga mulai mengintegrasikan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang menjadi prinsip penting SDG 4. Pendidikan tidak lagi dipandang berhenti pada jenjang sekolah formal. Pendidikan dipandang sebagai proses berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia. Program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, pendidikan masyarakat, dan pembelajaran digital juga menunjukkan upaya Indonesia membangun budaya belajar sepanjang hayat. Hal ini penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis akibat perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

Pendidikan kewarganegaraan global dalam SDGs juga berkaitan dengan penguatan identitas nasional yang terbuka terhadap keberagaman dunia. Dalam konteks Indonesia, kurikulum pendidikan Nasional yang ada berusaha menyeimbangkan antara nasionalisme dan globalisme. Peserta didik diarahkan untuk mencintai bangsa dan budaya nasional tanpa menutup diri terhadap perkembangan global. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi instrumen penting untuk membangun identitas nasional yang inklusif.

Implementasi SDGs dalam pendidikan nasional juga memerlukan transformasi kualitas guru sebagai agen perubahan sosial. Guru abad ke-21 dituntut agar memiliki kemampuan pedagogis, digital, sosial, dan ekologis. UNESCO menekankan pentingnya guru yang terlatih sebagai prasyarat pendidikan berkualitas. Dalam konteks Indonesia, peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan, sertifikasi, dan transformasi digital pendidikan menjadi langkah penting untuk mewujudkan tujuan SDG 4 secara efektif (UNESCO, 2005).

Tabel 2. Dimensi SDGs dalam Perkembangan Kurikulum Pendidikan Nasional

Aspek SDGs	Perkembangan
Pendidikan Berkualitas (SDG 4)	Bergeser dari orientasi pembentukan identitas nasional menuju pengembangan kompetensi dan pembelajaran transformatif.
Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan	Semakin kuat sejak KTSP hingga Kurikulum Merdeka melalui kebijakan inklusi, diferensiasi pembelajaran, dan prinsip <i>leave no one behind</i> .

Keterampilan Abad ke-21	Mulai terintegrasi pada KBK dan semakin diperkuat pada Kurikulum Merdeka melalui literasi, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis
<i>Global Citizenship Education</i>	Menjadi fokus utama pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka melalui penguatan karakter, toleransi, dan kebhinekaan global.
<i>Education for Sustainable Development (ESD)</i>	Semakin terlihat melalui integrasi isu lingkungan, tanggung jawab sosial, dan proyek pembelajaran berbasis keberlanjutan.
<i>Lifelong Learning</i>	Kurikulum mulai mengarahkan peserta didik pada budaya belajar sepanjang hayat yang relevan dengan dinamika global dan perkembangan teknologi.

Sumber: Diolah dari dokumen Kurikulum 1947, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, KBK 2004, KTSP 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka (2022).

Meskipun kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia semakin relevan dengan SDGs, akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kesenjangan ekonomi masih menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata bahwa akses pendidikan digital di Indonesia belum sepenuhnya merata. Kondisi ini sejalan dengan laporan UNESCO yang menunjukkan bahwa pandemi memperlemah akses pendidikan global dan memperbesar kesenjangan sosial pendidikan.

Selain tantangan struktural, implementasi pendidikan berbasis SDGs juga menghadapi tantangan kultural. Sebagian praktik pendidikan masih berorientasi pada capaian akademik semata dan kurang memberi ruang pada pengembangan kreativitas, empati sosial, serta kesadaran ekologis. Sistem evaluasi pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif sering kali mengabaikan dimensi karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Padahal, SDGs menuntut pendidikan yang holistik dan transformatif. Oleh karena itu, reformasi kurikulum perlu disertai perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional.

Integrasi SDGs dalam kurikulum Indonesia memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan global. Pendidikan nasional Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan berkelanjutan berbasis nilai lokal dan universal sekaligus.

Relevansi kurikulum pendidikan nasional terhadap SDGs menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia sedang bergerak menuju paradigma pembangunan manusia berkelanjutan. Pendidikan dimaknai sebagai sarana transformasi sosial, budaya, dan ekologis masyarakat. Kurikulum pendidikan Nasional memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi krisis global, menjaga keberagaman, dan membangun peradaban yang damai dan berkeadilan.

Keberhasilan integrasi SDGs dalam kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas implementasi, dan partisipasi seluruh elemen pendidikan. Pemerintah, sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat harus menjadi bagian dari gerakan pendidikan berkelanjutan secara kolektif. Pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan menjadi kebutuhan fundamental bangsa Indonesia

dalam menghadapi masa depan dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi SDG 4 tidak muncul secara tiba-tiba pada era Kurikulum Merdeka. Sebaliknya, berbagai unsur pendidikan berkualitas telah berkembang secara bertahap sejak reformasi kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan semakin menguat melalui Kurikulum 2013 serta Kurikulum Merdeka. SDGs dalam konteks Indonesia lebih tepat dipahami sebagai puncak dari proses transformasi kurikulum yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Kesimpulan

konstruksi paradigma kurikulum pendidikan Nasional di Indonesia periode 1947-2022 menunjukkan bahwa perubahan kurikulum nasional berlangsung secara dinamis mengikuti perkembangan politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan tuntutan global pada setiap periode sejarah pendidikan Indonesia. Transformasi kurikulum memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendidikan yang berorientasi administratif dan sentralistik menuju pendidikan yang lebih humanistik, partisipatif, fleksibel, dan berbasis kompetensi. Perubahan tersebut menegaskan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk identitas bangsa, karakter sosial, dan arah pembangunan nasional.

Dalam perspektif moderasi beragama, perkembangan kurikulum nasional memperlihatkan adanya penguatan nilai toleransi, keseimbangan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman secara bertahap. Integrasi nilai moderasi beragama semakin terlihat pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka melalui penguatan pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, pembelajaran kolaboratif, serta pengembangan budaya sekolah yang demokratis dan multikultural. Paradigma ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Nasional memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang religius, toleran, anti-kekerasan, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat plural.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma kurikulum pendidikan nasional semakin relevan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kurikulum nasional mulai mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi global, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan inklusif, literasi digital, dan pendidikan kewargaan global sebagai bagian dari pengembangan kompetensi abad ke-21. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka interpretatif baru untuk memahami sejarah kurikulum nasional Indonesia melalui perspektif moderasi beragama dan SDGs. Kerangka tersebut memperluas studi kurikulum dengan menunjukkan bahwa perubahan kurikulum mencerminkan proses institusionalisasi nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan pendidikan berkelanjutan dalam pembangunan pendidikan nasional.

Referensi

- Abas, S. Z., Muh. Arif, Mujahid Damopolii, & Burhanuddin Ak. Mantau. (2025). Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Merdeka Belajar. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 659–666. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1386>
- Advocates for International Development (A4ID). (2022). *SDG 4: Quality Education – A Legal Guide* [Report / Legal Guide]. Advocates for International Development (A4ID). www.a4id.org
- Allo, M. D. G. (2020). Curriculum Fidelity in the Secondary Education in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06).
- Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum Development: Teacher Involvement in Curriculum Development. *Journal of Education and Practice*, 7(9).
- Azalia, A., Lerian, D. P., Taufik, E., Izzah, S. N., Nugraha, S., & Arya, G. Z. (2023). Systematic literature review: Curriculum development principle. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 2(1), 141–154. <https://doi.org/10.17509/curricula.v2i1.53637>
- Creswell, John W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Fadila, F. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(4), 4357–4366.
- Fahri Hidayat. (2026). *Sejarah Dunia Islam Modern: Nasionalisme dan Transisi ke Negara-Bangsa*. Saizu Publisher.
- Fuadi, M. H. (2025). Islamic Algorithms: How Digital Platform Algorithms Shape Islamic Communication Strategies and Religious Authorities. *Proceedings of of International Conference on Religion, Social and Humanities*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/proceedingsoficresh.v4i.132>
- Fuadi, M., Zulfikar, T., & Shadiqin, S. I. (2023). Analysis of the Implementation of the Independent Curriculum in Elementary Schools in Indonesia. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 617–623. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4071>
- Galuh Mahardika, Moch. D., & Nur Ramadhan, F. (2021). Pembelajaran IPS sebagai penguat nasionalisme dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*, 6(2), 78–91. <https://doi.org/10.17977/um022v6i22021p78>
- Hastutie, G. (2024). *Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Rahmatan Lil'Alamin*. 4.
- Hidayah, R., Wangid, M. N., & Wuryandani, W. (2022). Elementary school teacher perception of curriculum changes in Indonesia. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 12(2). <https://doi.org/10.47750/pegegog.12.02.07>
- Hidayah, V. N., & Yuliawati, F. (2021). Kurikulum Tematik 2013 dalam Framework Sustainable Development Goals di Sekolah Dasar. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 162–171. <https://doi.org/10.17509/eh.v13i2.35824>
- Hidayat, F. (2026). Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) Dalam Pendidikan Dasar: Analisis Filosofis Terhadap Transformasi Pembelajaran Di Era Artificial Intelligence. *Walada: Journal of Primary Education*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61798/wjpe.v5i1.470>
- Hidayat, F., & Febriana, M. (2025). Integrasi Nilai Religius-Nasionalis KH Saifuddin Zuhri dalam Pembelajaran IPAS Kelas VI SD/MI. *Jurnal Dawuh Guru*, 5(1), 243–

258. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/guru.v5i1.1817>
- Hidayat, M. T., Suryadi, S., Latifannisa, N., Sari, S. N., & Rino, R. (2025). Evolution of The Education Curriculum in Indonesia. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 6(2), 381–395. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v6i2.1312>
- Ichwan, Moh. N., Mustaqim Pabbajah, & Faizal Amin. (2024). Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 320–345. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545>
- Idris, M. (2021). The Implementation Of Religious Moderation Values In Islamic Education And CHARACTER SUBJECT AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 9 MANADO. *Strategic Management*, 20(6).
- Melisa, R., Ashadi, A., Triastuti, A., Hidayati, S., Salido, A., Ero, P. E. L., Marlina, C., Zefrin, Z., & Al Fuad, Z. (2025). Critical Thinking in the Age of AI: A Systematic Review of AI's Effects on Higher Education. *Educational Process International Journal*, 14(1). <https://doi.org/10.22521/edupij.2025.14.31>
- Nursyaidah, N., Putri, Y. E., & Lubis, A. A. (2023). Implementation of Independent Curriculum in Learning Indonesian in Elementary School. *Syekh Nurjati International Conference on Elementary Education*, 1(0), 153. <https://doi.org/10.24235/sicee.v1i0.14566>
- Pujiono, E., Rohbiyatun, H., Sulistiyahati, A., Tristiandari, H., Nurhayati, R., Agustin, T. F. S., Listyowati, L., & Egar, N. (2025). Perbandingan Kurikulum 1947, 1964, 1968 dan Kurikulum Merdeka dalam Konteks Pelaksanaan Pendidikan Karakter. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 14(2), 188–195. <https://doi.org/10.26877/jmp.v14i2.23166>
- Purwanta, H., Musadad, A. A., & Purwanto, D. (2025). Dealing with Radical Islamic Movements and Their Militias: The Policies of Peaceful Cultural Coexistence in Surakarta During 2014–2024. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 13(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v13i2.31544>
- Rajurkar, S., Chavan, K. D., Kachewar, S. G., & Giri, P. A. (2018). A review of significant aspects contributing to curriculum development. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 7(1), 317. <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20185185>
- Salsabila, S. A. P., Nabilah, F., & Rachman, I. F. (2025). Studi Evaluasi Implementasi SDGs: Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, 5, 33–40.
- Taufik, E. T., Kurniawan, S., Suprianto, B., Fitriyani, F. N., & Miftah, M. (2024). *One Bloodline, Multiple Religiosities: Malay-speaking Hadramis on Being 'Moderate-most' Muslims in Contemporary Indonesia*. 8(2).
- UNESCO. (2005). *Contributing to a More Sustainable Future: Quality Education, Life Skills and Education for Sustainable Development* [Report / Policy Paper]. UNESCO. <http://www.unesco.org/education>
- Wibowo, S. E., Saptono, B., Hastomo, A., Herwin, & Ardiansyah, A. R. (2023). The Challenges of Implementing the Independent Curriculum in Indonesian Language Learning in Elementary School High Classes. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(3), 536–545. <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i3.59167>